



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/190/VI.02/HK/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG SEBAGIAN BIDANG TANAH HAK  
PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK  
DI JALAN RYACUDU KELURAHAN WAY DADI KECAMATAN SUKARAME  
KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA FAUZIE RACHMAN**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/274/VI.02/HK/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat Di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Tanpa Lelang dan sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-159/WKN.05/2023 hal Penyampaian Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 4 September 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Penjualan Secara Langsung Sebagian Bidang Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan Ryacudu Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada Saudara Fauzie Rachman, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 27/DPRD.LPG/13.01/2015 tentang Persetujuan Atas Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/6/B.XI/HK/2016 tentang Penetapan Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (sebelumnya Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (sebelumnya Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada Masyarakat;
  3. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1319/15.2/III/2016 Hal Izin Pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 23 Maret 2016;
  4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/274/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat Di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Penjualan Tanpa Lelang;
  5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor: S-159/WKN.05/2023 hal Penyampaian Laporan Penilaian Barang Milik Daerah berupa Tanah pada Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 4 September 2023;
  6. Surat Pernyataan Saudara FAUZIE RACHMAN, tanggal 15 Januari 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG SEBAGIAN BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN RYACUDU KELURAHAN WAY DADI KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA FAUZIE RACHMAN.**

KESATU : Menetapkan penjualan secara langsung sebagian bidang tanah dari sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) Nomor 01/SI tanggal 16 November 1994 atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.



- KEDUA : Bidang tanah yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan **Luas 710 M<sup>2</sup>** (tujuh ratus sepuluh meter persegi) dengan harga jual **Rp1.085.118.000,-**(Satu milyar delapan puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- KETIGA : Saudara **FAUZIE RACHMAN** selaku Penerima pelepasan hak untuk melakukan pembayaran secara langsung/lunas ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung dengan Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila Saudara **FAUZIE RACHMAN** tidak melakukan pembayaran sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua sampai dengan batas waktu sebagaimana tersebut pada Diktum Ketiga maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Menunjuk pengelola barang untuk menandatangani pelepasan hak atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dihadapan Notaris, Camat, atau Kepala Kantor Pertanahan, atas sebagian bidang tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Ryacudu Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
- KEENAM : Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 2 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;